

KONFLIK TERBUKA PALESTINA-ISRAEL DAN PENTINGNYA MENGHIDUPKAN KEMBALI PERUNDINGAN DAMAI

7

Simela Victor Muhamad

Abstrak

Konflik terbuka Palestina-Israel, meski saat ini sudah gencatan senjata, menjadi keprihatinan internasional. Konflik dipicu kebijakan sepihak Israel yang akan menggusur warga Palestina dari wilayah Sheikh Jarrah, Yerusalem, yang kemudian memunculkan aksi kekerasan dan berujung pada pertempuran antara Hamas dan Militer Israel. Tulisan ini mengkaji mengapa konflik Palestina-Israel terjadi dan bagaimana seharusnya disikapi masyarakat internasional. Konflik Palestina-Israel, tidak dapat dilepaskan dari aksi provokasi yang sering dilakukan Israel terhadap warga Palestina, khususnya terkait kebijakan perluasan permukiman warga Yahudi di wilayah Palestina. Tindakan Israel yang mengabaikan hak-hak bangsa Palestina dan hukum internasional tersebut tidak bisa dibiarkan terus berlanjut karena berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itu, aksi kolektif internasional untuk menghidupkan kembali perundingan damai, termasuk memaksa Israel agar patuh terhadap kesepakatan-kesepakatan internasional terkait penyelesaian konflik Palestina-Israel perlu terus diupayakan oleh masyarakat internasional, termasuk Indonesia. Penjajahan adalah inti persoalan Palestina-Israel. Dunia tidak dapat membiarkan Palestina menerima ketidakadilan sepanjang hidupnya.

Pendahuluan

Konflik terbuka Palestina-Israel belakangan ini telah menyita perhatian media. Pasalnya, konflik yang meningkat intensitasnya pasca-Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah tersebut telah menimbulkan banyak korban jiwa. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan, perang selama 11 hari itu telah mengakibatkan 248 orang tewas, di antaranya 66 anak kecil, 39 perempuan, dan 17 orang lansia,

serta 2.000 orang luka-luka. Sekitar 17.000 rumah rusak dengan kondisi hancur total dan kerusakan berat atau ringan (Rahman, Kompas, 24 Mei 2021). Berkembangnya konflik terbuka Palestina-Israel tersebut dipicu oleh peristiwa di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, sebelum Idul Fitri.

Sebelum Idul Fitri, warga Palestina yang bermukim di wilayah Sheikh Jarrah (Palestina), yang terancam digusur oleh otoritas Israel,



melakukan aksi protes di kompleks Masjid Al-Aqsa yang kemudian direspons dengan kekerasan oleh Israel. Walau tidak ada yang tewas dalam peristiwa itu, serangan yang dilakukan mengakibatkan puluhan orang terluka dan kerusakan di sejumlah bagian kompleks Al-Aqsa (Tempo.co.id., 13 Mei 2021). Kekerasan tersebut terus berkembang yang berujung pada pertempuran antara Hamas (Palestina) dan Militer Israel.

Konflik terbuka Palestina-Israel tersebut, meski saat ini telah gencatan senjata, menimbulkan keprihatinan internasional. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, menilai pertempuran kali ini 'sangat mengerikan' dan jika konflik tersebut terus berlanjut maka akan menimbulkan implikasi yang luas, tidak saja akan terjadi krisis keamanan dan kemanusiaan di Palestina dan Israel, tetapi juga kawasan (cnnindonesia.com., 17 Mei 2021). Sementara, konflik terbuka Palestina-Israel sudah beberapa kali terjadi, dan berpotensi terulang kembali. Tulisan ini mengkaji mengapa terjadi konflik terbuka antara Palestina dan Israel, apa penyebabnya, dan bagaimana seharusnya disikapi masyarakat internasional, termasuk Indonesia.

Penyebab Konflik

Terjadinya konflik terbuka antara Palestina, khususnya Hamas dan militer Israel, sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari aksi provokasi yang sering dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina, khususnya terkait kebijakan perluasan permukiman warga Yahudi di wilayah Palestina. Terjadinya konflik Palestina-Israel

belakangan ini pun dipicu oleh hal yang sama, di mana otoritas Israel berencana mengusir warga Palestina dari Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur, yang merupakan salah satu permukiman warga Arab Palestina paling tua di Yerusalem.

Tindakan otoritas Israel tersebut diprotes warga Palestina, yang kemudian berkembang menjadi bentrokan antara polisi Israel dan demonstran di sejumlah wilayah Tepi Barat. Ketegangan bertambah setelah shalat Jumat terakhir bulan Ramadhan di kompleks Masjid Al-Aqsa, ketika warga muslim Palestina bertrok dengan aparat keamanan Israel yang mengakibatkan sejumlah warga Palestina terluka. Hamas, yang telah memperingatkan Israel agar menghentikan kekerasan di kompleks Masjid Al-Aqsa, tetapi tidak dihiraukan, membalas tindakan kekerasan aparat keamanan Israel tersebut dengan serangan roket. Saling serang pun kemudian terjadi antara Palestina (Hamas) dan Israel.

Konflik terbuka Palestina-Israel yang dipicu oleh isu perluasan permukiman warga Yahudi sudah beberapa kali terjadi, dan sangat mungkin terjadi kembali di kemudian hari, terutama ketika otoritas Israel tetap memaksakan kehendaknya, walau itu melanggar hukum internasional. Juru bicara Kantor Hak Asasi PBB, Rupert Colville, di Jenewa pada 8 Mei 2021, menegaskan kembali posisi PBB terkait pendudukan Israel atas wilayah Palestina, bahwa permukiman warga Yahudi di wilayah Palestina yang diduduki Israel melanggar hukum internasional (Republika.co.id., 8 Mei 2021). Hukum internasional memandang Tepi Barat dan

Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan dan menganggap semua aktivitas pembangunan permukiman Yahudi di sana ilegal.

Sebaliknya, PM Israel Benyamin Netanyahu tidak mengakui hukum internasional tersebut dan menolak desakan komunitas internasional terhadap Israel agar menghormati hak-hak Palestina. Dukungan Presiden Amerika Serikat (AS) sebelumnya, Donald Trump terhadap Israel melalui proposal damai *Deal of Century*, tampaknya cukup memengaruhi Netanyahu untuk tindakan kerasnya itu. Dalam proposal damai Trump tersebut, yang antara lain dirancang oleh menantu Yahudinya, Jared Kushner, Yerusalem disebutkan sebagai ibu kota Israel, sedangkan ibu kota Palestina berada di pinggiran Kota Yerusalem. Disebutkan juga, daerah-daerah yang kini didiami warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat akan tetap menjadi wilayah Palestina. Namun, ribuan permukiman Yahudi yang telah dibangun di wilayah itu, termasuk di Yerusalem, akan menjadi wilayah Israel (sindonews.com., 18 Mei 2019).

Proposal Trump tersebut jelas menyimpang dari hukum internasional dan referensi politik tentang solusi dua negara, dan jika hal tersebut diterapkan, sudah pasti akan memicu konflik terbuka Palestina-Israel yang berkepanjangan. Artinya, penyebab konflik terbuka Palestina-Israel berkaitan erat dengan isu pendudukan dan tindakan sepihak Israel yang bersikeras membangun dan memperluas permukiman warga Yahudi di wilayah Palestina. Warga Palestina, yang merasa berhak berada di wilayahnya dan kerap diintimidasi

oleh aparat keamanan Israel, sudah sewajarnya membela diri untuk mempertahankan haknya, termasuk melalui perjuangan bersenjata ketika harus berhadapan dengan pasukan Israel.

Menghidupkan Kembali Perundingan Damai

Konflik terbuka Palestina-Israel yang telah menimbulkan banyak korban jiwa, khususnya di pihak Palestina, sudah tentu menimbulkan keprihatinan internasional. Keprihatinan tidak saja datang dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang menggelar sidang darurat secara virtual pada 16 Mei 2021 dengan sejumlah resolusi yang dihasilkan, tetapi juga dari Uni Eropa dan Dewan Keamanan PBB, meski ekspresi keprihatinan mereka tidak tertuang dalam satu suara, karena di dalamnya terdapat negara yang pro-Israel. Memang tidak mudah membangun kesamaan pandangan dan sikap dari negara-negara di dunia terhadap konflik Palestina-Israel, terutama ketika masih ada pihak yang 'mau menang sendiri' dan mengabaikan suara mayoritas internasional.

Bersyukur, gencata senjata akhirnya tercapai pada Jumat 21 Mei 2021, setelah 11 hari Hamas dan Israel berperang, melalui mediasi yang dilakukan Mesir secara simultan dan timbal balik. Mesir menjadi mediator karena Mesir merupakan salah satu dari sedikit negara yang menjalin hubungan resmi dengan kedua pihak. Kesepakatan penghentian kekerasan dicapai setelah Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, dan Presiden AS, Joe Biden, berdiskusi lewat sambungan telepon pada Kamis, 20 Mei 2021, yang khusus membahas langkah mengakhiri

konflik berdarah Israel-Hamas (detik.com., 21 Mei 2021). Presiden Mesir juga mendiskusikan penghentian kekerasan ini dengan Sekjen PBB, Antonio Guterres. Presiden Sisi dan Guterres mendiskusikan pentingnya meluncurkan usaha kolektif internasional yang ditujukan pada memulai kembali jalan negosiasi antara kedua pihak untuk meraih perdamaian yang diinginkan.

Konflik terbuka Palestina-Israel selama 11 hari melahirkan realitas baru dalam bentuk kesadaran masyarakat internasional tentang mendesaknya dimulai kembali perundingan damai Palestina-Israel. Mesir dalam hal ini aktif berkomunikasi dengan kekuatan regional dan internasional guna menghidupkan proses perdamaian Timur Tengah. Terakhir, perundingan Palestina-Israel digelar pada 2013-2014 di bawah inisiatif Menteri Luar Negeri (Menlu) AS John Kerry, namun gagal.

Momentum untuk menghidupkan kembali proses perdamaian Timur Tengah ini harus ditujukan untuk mencari solusi yang adil dan menyeluruh atas isu Palestina. Sebagian besar komunitas internasional, termasuk Otoritas Palestina, menginginkan solusi dua negara, yakni berdirinya Negara Palestina berdampingan secara damai dengan Israel. Namun, solusi itu terus menemui jalan buntu akibat langkah agresif Israel memperluas wilayah pendudukan di Palestina dan memanasakan situasi di sana.

Sikap Indonesia

Menlu RI Retno LP Marsudi menyebut semua penderitaan Palestina disebabkan oleh Israel sebagai kekuatan penjajah (*occupying*

power). Penjajahan adalah inti persoalan Palestina-Israel. Dunia tidak dapat membiarkan bangsa Palestina kehilangan pilihannya dan menerima ketidakadilan sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, dalam pidatonya di hadapan Sidang Majelis Umum PBB pada 20 Mei 2021, Menlu Retno mengajak semua negara di dunia untuk berkomitmen dan bersatu melawan pendudukan Israel di Palestina. Dukungan Indonesia pada kemerdekaan dan kedaulatan Palestina tidak bisa dilepaskan dari amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan.

Implementasi dari sikap politik itu antara lain dilakukan dengan penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955, dan KTT Gerakan Non-Blok di Beograd pada 1961, yang turut diinisiasi oleh Indonesia. Lewat dua peristiwa historis itu, Indonesia menegaskan, relasi antarnegara harus didasarkan pada asas atau prinsip perdamaian, kemerdekaan, dan keadilan. Di sisi lain, sejarah juga mencatat, Palestina adalah salah satu entitas atau negara yang pertama kali turut mengakui kedaulatan Indonesia. Menurut catatan Kemenlu RI—dirujuk dari laman resmi—pada 1948, Mufti Agung Haji Amin El Husni berkunjung ke Indonesia untuk menyampaikan dukungan Palestina atas perjuangan kemerdekaan Indonesia (Kompas, 24 Mei 2021).

Dua fakta sejarah tersebut hingga saat ini turut mewarnai dukungan Indonesia pada perjuangan kemerdekaan Palestina. Sejarah juga mencatat, Indonesia merupakan salah satu negara yang

mensponsori Resolusi Majelis Umum PBB No 67/19, pada 29 November 2012, untuk mengesahkan Palestina sebagai *non-member observer state* PBB. Langkah serupa dilakukan Indonesia saat turut mensponsori resolusi yang memungkinkan bendera Palestina berkibar secara resmi di Markas Besar PBB pada 30 September 2015.

Indonesia memang harus menggalang dukungan dari sejumlah negara untuk Palestina. Seperti ketika Presiden Joko Widodo pada awal Desember 2017 memaksimalkan komunikasi kepada negara-negara anggota OKI menyikapi langkah unilateral AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan berencana memindahkan kedutaan besar mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem. Presiden Jokowi mendorong agar negara-negara OKI bersatu. Seiring dengan itu, di New York, dalam pertemuan khusus Komite Palestina PBB guna membahas langkah AS itu, Wakil Tetap RI untuk PBB Dubes Triansyah Djani mengatakan, sikap AS harus ditolak karena bertentangan dengan komitmen dunia bagi penyelesaian damai konflik Palestina-Israel sesuai prinsip solusi dua negara.

Penutup

Konflik terbuka Palestina-Israel sangat mungkin terjadi ketika Israel, sebagai pihak yang melakukan pendudukan atas wilayah Palestina, melakukan kebijakan sepihak yang merugikan warga Palestina, seperti melakukan pembangunan permukiman warga Yahudi secara ilegal di wilayah Palestina. Tindakan Israel yang mengabaikan hak-hak bangsa Palestina dan tidak menghormati hukum internasional tersebut tidak bisa dibiarkan terus

berlanjut dan diberi ruang untuk terus dilakukan oleh Israel, karena hanya akan melahirkan konflik terbuka dengan Palestina. Oleh karena itu, meskipun tidak mudah dilakukan, aksi kolektif internasional untuk memaksa Israel agar patuh terhadap hukum internasional dan kesepakatan-kesepakatan internasional lain terkait penyelesaian konflik Palestina-Israel perlu untuk terus disuarakan dan diupayakan oleh masyarakat internasional, dan Indonesia harus menjadi bagian yang terdepan dalam menyuarakan dan mengupayakan hal itu.

Referensi

- “Ada Peran Mesir di Gencatan Senjata Israel-Hamas”, 21 Mei 2021, <https://news.detik.com/internasional/d-5577504/ada-peran-mesir-di-gencatan-senjata-israel-hamas-bagaimana-dengan-erdogan>, diakses 23 Mei 2021.
- “AS Dukung Gencatan Senjata”, *Republika*, 19 Mei 2021, hal. 7.
- “Komitmen dan Konsistensi Indonesia untuk Palestina”, *Kompas*, 24 Mei 2021, hal. 2.
- “Konflik Palestina Israel Memanas, Salat Ied Tetap Damai di Masjid Al-Aqsa”, 13 Mei 2021, <https://dunia.tempo.co/read/1462093/konflik-palestina-israel-memanas-salat-ied-tetap-damai-di-masjid-al-aqsa>, diakses 18 Mei 2021.
- “Menakar Sikap AS tentang Palestina-Israel”, *Kompas*, 27 Mei 2021, hal. 4.
- “Netanyahu Ngotot Mau Bangun Permukiman Ilegal Israel di Yerusalem”, 11 Mei 2021, <https://dunia.tempo.co/read/1461435/netanyahu-ngotot-mau-bangun-permukiman-ilegal-israel-di-yerusalem>, diakses 18 Mei 2021.
- “Palestina: ‘Deal of Century’ Trump

Adalah Penderitaan Kami Seabad", 18 Mei 2019, <https://international.sindonews.com/berita/1405204/41/palestina-deal-of-century-trump-adalah-penderitaan-kami-seabad>, diakses 23 Mei 2021.

"PBB Minta Israel Setop Gusur Rumah Palestina di Yerusalem", 8 Mei 2021, <https://www.republika.co.id/berita/qss6pc377/pbb-minta-israel-setop-gusur-rumah-palestina-di-yerusalem>, diakses 18 Mei 2021.

Rahman, Musthafa Abd. "Menuju Palestina Merdeka dan Damai", *Kompas*, 24 Mei 2021, hal. 1.

"Sekjen PBB Serukan Israel-Palestina Hentikan Serangan", 17 Mei 2021, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210517011608-120-643074/sekjen-pbb-serukan-israel-palestina-hentikan-serangan>, diakses 19 Mei 2021.

"Seruan Damai Menguat", *Kompas*, 19 Mei 2021, hal. 4.

"UN Security Council to hold new meeting on Israel-Palestinian clashes Friday", 13 Mei 2021, <https://www.thejakartapost.com/news/2021/05/13/un-security-council-to-hold-new-meeting-on-israel-palestinian-clashes-friday.html>, diakses 19 Mei 2021.

"Uni Eropa Serukan Israel-Palestina Lakukan Gencatan Senjata", 19 Mei 2021, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210519021617-120-644036/uni-eropa-serukan-israel-palestina-lakukan-gencatan-senjata>, diakses 19 Mei 2021.



Simela Victor Muhamad
simela.muhamad@dpr.go.id

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si. adalah Peneliti Ahli Utama Bidang Isu-isu Politik Strategis, Masalah Internasional dan Domestik pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian (Puslit BKD) DPR RI. Aktif sebagai peneliti pada Puslit BKD DPR RI, yang bertugas memberikan dukungan substansi terkait isu-isu hubungan internasional kepada Anggota DPR RI. Beberapa Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain: "Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba ke Indonesia: Masalah dan Upaya Penanganannya" (bagian dari buku Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2017); "Isu Keamanan Semenanjung Korea dan Upaya Damai Parlemen." (artikel di Jurnal Politica Vol 7 No. 1, Mei 2016); "Peran Asian Parliamentary Assembly dalam Mendukung Solusi Damai Palestina-Israel" (artikel di Jurnal Politica, Vol. 8 No. 1, Mei 2017); "Indonesia dan Kerja Sama Internasional Penanggulangan Terorisme di Kawasan" (bagian dari buku Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2018); dan "Proxy War dalam Konflik di Lebanon" (bagian dari buku Proxy War di Timur Tengah, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2019).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.